



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHIBUDDIN, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
ACEH,

(MUHIBUDDIN, S.H., M.H.)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
NAGAN RAYA,

(DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengemban industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyeiarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penangan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76%
		Nilai Kinerja Anggaran	90%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.485.272.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.347.966.000,-
Jumlah		Rp. 7.833.238.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencan Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Nagan Raya, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Pt. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
ACEH,

(MOHIBUDDIN, S.H., M.H.)



Pt. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
NAGAN RAYA,

(DUKA EMBISANA, S.E., S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EVAN DENI SETIAWAN, S.H
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN



DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
19720703 199403 1 00 1

EVAN DENI SETIAWAN, S.H
MADYA WIRA/ 19850904 200501 100 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	75%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	2,73

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Umum	36.580.000
2	Gaji dan Tunjangan	3.975.386.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.211.000.000
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	125.000.000
Jumlah		6.347.966.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN



[Handwritten Signature]
DIANA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MADYA / 19720703 199403 1 00 1

[Handwritten Signature]

EVAN DENI SETIAWAN, S.H
MADYA WIRA / 19850904 200501 100 1



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD BUCHORI, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1

AHMAD BUCHORI, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19841015 200912 1 00 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	30%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	75%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	75%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah	75%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		dieksekusi	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	3,8%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidana Umum	16.940.000
2	Penuntutan Perkara Pidana Umum	353.250.000
3	Upaya Hukum/Eksekusi	12.000.000
4	Restorative Justice	6.176.000
JUMLAH		388.366.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM


BIJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1


AHMAD BUCHORI, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19841015 200912 1 00 3



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRIO SUHERMAN, S.H., S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B, WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



DJAKA B, WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MADYA/ 19720703 199403 1 00 1

HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19850610 200812 1 00 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	70%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	80%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	85%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelidikan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	92.082.000
2	Penyidikan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	206.000.000
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	237.960.000
4	Eksekusi perkara Korupsi	11.080.000
Jumlah		547.122.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



[Handwritten Signature]
DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDYA/ 19720703 199403 1 00 1

HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19850610 200812 1 00 1



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA



DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1


M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19830915 200912 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	70%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	70%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	7
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4.0

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	13.200.000
2	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	24.000.000
3	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	30.000.000
4	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	6.000.000
5	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Negeri Nagan Raya	6.000.000
Jumlah		79.200.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

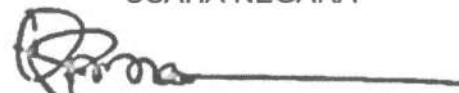
Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA




DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1



M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19830915 200912 1 00 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NAGAN RAYA

Plt. KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BR



DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1

HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19850610 200812 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan Barang Bukti	65.580.000
2	Pemusnahan Barang Bukti	22.500.000
3	Biaya Antar Barang Bukti Kepada Masyarakat	3.360.000
4	Penyelesaian Barang Rampasan	111.920.000
Jumlah		203.360.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NAGAN RAYA

**Plt. KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB**



DJAKA B. W. BISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1

HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19850610 200812 1 00 1



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan raya, 1 April 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA,

Plt. KEPALA SEKSI INTELIJEN,



DJAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
JAKSA MUDA/ 19720703 199403 1 00 1


M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19830915 200912 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	70%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	70%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	70%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	70%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Strategis		
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	70%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	70%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	70%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan	40.000.000
2	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	91.376.000
	Jumlah	131.376.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, 1 April 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

Pit. KEPALA SEKSI INTELIJEN



D. JAKA B. WIBISANA, S.E., S.H
19720703 199403 1 00 1

M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA/ 19830915 200912 1 00 1



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAJUL HUDA, Amd
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EVAN DENI SETIAWAN, S.H
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

EVAN DENI SETIAWAN, S.H
MADYA WIRA/ 19850904 200501 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN**

TAJUL HUDA, Amd
MUDA WIRA/ 19850112 200812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	75%
2	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	2,73

No	Kegiatan	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.211.000.000
2	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	125.000.000
Jumlah		2.336.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

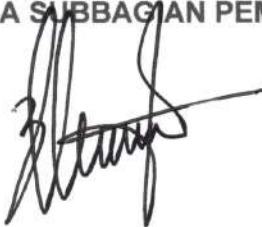
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN



EVAN DENI SETIAWAN, S.H

MADYA WIRA/ 19850904 200501 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DASKRIMTI, DAN PERPUSTAKAAN**



TAJUL HUDA, Amd

MUDA WIRA/ 19850112 200812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAGUS AGUNG SANTOTO, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN
OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
Jaksa Pratama : 19850610 200812 1 00 1

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian
Operasi Pada Seksi Tindak Pidana Khusus

BAGUS AGUNG SANTOTO, S.H
Ajun Jaksa : 19950529 202012 1 00 9

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB SEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	70%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	70%

No	Rincian Output
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam tahap Penyelidikan
2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam Tahap Penyidikan
3	Terlaksananya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur Pidana Khusus

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Nagan Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Pada Seksi Tindak Pidana Khusus



HENDRIO SUHERMAN, S.H., M.H
Jaksa Pratama : 19850610 200812 1 00 1



BAGUS AGUNG SANTOTO, S.H
Ajun Jaksa : 19950529 202012 1 00 9



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUNA ANNISA, S.H
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I BIDANG INTELJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
Jabatan : PIt. KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nagan Raya, Juli 2025

Pihak Kedua,

PIt. KEPALA SEKSI INTELIJEN

M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
JAKSA MUDA : 19830915 200912 1 00 1

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I BIDANG INTELJEN

YUNA ANNISA, S.H
Ajun Jaksa Madya : 19971112 202203 2 00 6

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBSEKSI I BIDANG INTELIJEN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	70 %
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	70 %
3	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan produksi intelijen	intelijen	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	70%

No	Rincian Output
1	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
2	Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan
3	operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen
4	Penyuluhan dan penerangan Hukum

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Nagan Raya, Juli 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA SEKSI INTELIJEN

KEPALA SUBSEKSI I BIDANG INTELIJEN



M. AGUNG KURNIAWAN, S.H., M.H
Jaksa Muda : 19830915 200912 1 00 1

YUNA ANNISA, S.H
Ajun Jaksa Madya : 19971112 202203 2 00 6